

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 ini merupakan keputusan politik tentang arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai lima tahun ke depan dan merupakan dokumen perencanaan taktis strategis mencakup seluruh wewenang, fungsi dan urusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Untuk itu RPJMD Kabupaten Pekalongan juga merupakan Rencana Strategis Kepala Daerah, sebab harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD untuk pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.

Arah pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun mendatang tertuang secara singkat dan padat dalam rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2011-2016. Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2011– 2016 adalah :

***”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan
yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”***

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera.
- b. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat.
- c. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat.

Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera***, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.
- b. ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat***, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya berahlak mulia, aparturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. ***Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat***, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
- c. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.
- d. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
- e. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah.
- f. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
- g. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

3. Tujuan dan Sasaran

Masing-masing misi tersebut diatas perlu dijabarkan ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik

Tujuan dari misi tersebut adalah :

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup system, kelembagaan, aparatur dan

pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

- 2) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM);
 - 3) Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat;
 - 4) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.
- b. Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.
 - 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - 3) Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa.
 - 4) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat.
 - 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
 - 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa.
 - 7) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman.
- c. Misi 3: Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal

Tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
- Menurunnya angka gizi buruk.
- Menurunnya angka kesakitan penduduk.
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda.
- Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.

- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal.

- Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan.
 - Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.
 - Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik.
 - Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
 - Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 5) Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.

d. Misi 4: Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.

Tujuan dari misi tersebut adalah:

- 1) Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM.
 - Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
 - Meningkatnya aktivitas perdagangan.
 - Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan.
- 2) Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya produktivitas pertanian.
- Meningkatnya produktivitas peternakan.
- Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan.

e. Misi 5: Mendorong iklim investasi berbasis potensi dan budaya daerah.

Tujuan misi tersebut adalah:

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya potensi produk unggulan daerah.
- 2) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal.

f. Misi 6: Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.

Tujuan misi tersebut adalah:

Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia.
- 2) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat.
- 3) Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal.
- 4) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

g. Misi 7: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan misi tersebut adalah:

Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- 2) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
- 3) Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.

4. Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan yang dimaksudkan adalah adanya penekanan fokus perhatian pada empat (4) segmentasi periode pembangunan jangka menengah. Meliputi *tahap pertama*, Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011-2012), *tahap kedua*, Pengembangan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (2012-2014), *tahap ketiga* percepatan program prioritas (2014-2015) dan *tahap keempat* Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016). Penekanan fokus dimaksud bukan berarti

menegasikan aspek lain, dan muara dari semua sasaran yang ingin dicapai atau *the ultimate goal*-nya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam setiap pentahapan dapat dimaknai upaya perwujudan *ultimate goal* dimaksud. Perincian setiap pentahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahap Konsolidasi dan Pemantapan Program (2011 – 2012).

Pada tahap ini prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dari sisi aparatur maupun kelembangaan, serta pemantapan kemampuan para pelaksana dalam implementasi program, termasuk program-program yang bersifat prioritas.

b. Tahap Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (2012 – 2014)

Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada pengembangan infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yaitu jalan, jembatan, irigasi, air bersih, lingkungan hidup, listrik, perdagangan, industri, kearsipan, investasi, kesehatan, dan pendidikan. Melalui pengembangan infrastruktur diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan investasi, produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perlindungan tenaga kerja dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan.

c. Tahap Percepatan Prioritas Program Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2014 - 2015).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya percepatan pencapaian program-program prioritas telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan *e-government*, penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil, peningkatan investasi, pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penguatan forum masyarakat sebagai media komunikasi publik, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata.

d. Tahap Pemantapan Pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera (2015 - 2016).

Pada tahap ini program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut adalah pemantapan penanggulangan kemiskinan, pemantapan pelayanan

kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri kecil, peningkatan kualitas produktifitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pengendalian lingkungan hidup.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

a. Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik.

- 1) Menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi kinerja SKPD, dan perwujudan *e-government*.
- 2) Menciptakan kelembagaan pemerintahan yang responsif dan mampu menyelenggarakan Tupoksi secara maksimal melalui penetapan perangkat kebijakan tentang pelaksanaan *good governance*, dan penataan SOTK yang ramping namun kaya fungsi.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek serta pembinaan moral dan mental aparatur.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, optimalisasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah serta pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.
- 6) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian yang efektif, peningkatan kualifikasi dan jumlah aparatur pengawas serta peningkatan cakupan pemeriksaan.
- 7) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kinerja BUMD.
- 8) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik kewenangan wajib maupun pilihan melalui pengembangan potensi daerah, penyelenggaraan kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat.
- 9) Optimalisasi pengelolaan arsip melalui peningkatan kualitas pendataan, pemeliharaan dan akuisisi arsip.

b. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kepada Pemerataan Wilayah dan Berwawasan Lingkungan.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana

prasarana perhubungan dan peningkatan kuantitas sarana keselamatan lalu lintas serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat.

- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya.
- 3) Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan, peningkatan partisipasi masyarakat untuk turut serta memelihara jalan dan jembatan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi rusak dan pemeliharaan secara intensif serta pembangunan saluran irigasi baru serta optimalisasi peran dan partisipasi P3A (Paguyuban Petani Pemakai Air).
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian yang berkualitas melalui pengintegrasian penataan kawasan industri dan perdagangan, penataan pedagang kakilima, peningkatan kualitas pasar tradisional, optimalisasi pasar agro dan pengaturan serta pengendalian pasar *retail* modern.
- 6) Meningkatkan jumlah rumah tangga berlistrik melalui Pengembangan jaringan PLN ke desa yang terjangkau PLN dan pengembangan sumber energi listrik terbarukan (mikro hidro) bagi desa yang tidak atau belum terjangkau PLN.
- 7) Meningkatkan pemerataan penyediaan air bersih ke pelosok desa melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pemeliharaan sumber-sumber air bersih berbasis potensi/kearifan lokal, peningkatan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih.
- 8) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas sanitasi melalui pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
- 9) Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui pembuatan tempat pembuangan sampah *sanitary landfill*, dan pengelolaan sampah dengan metode 3R.
- 10) Meminimalisir penggunaan lahan tidak sesuai dengan tataruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan lahan, peningkatan komitmen dan pengawasan pemerintah serta penegakan hukum dalam pelaksanaan perda tataruang.
- 11) Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD), peningkatan kompetensi aparatur desa, peningkatan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan dari bupati kepada pemerintah desa.
- 12) Meningkatkan penanganan kerusakan hutan melalui peningkatan peran LMDH, dan penegakan hukum.

- 13) Mengurangi lahan kritis melalui peningkatan kesadaran dan konservasi lahan serta dalam pemanfaatan lahan secara bijaksana.
- 14) Meningkatkan keasrian dan keindahan ruang terbuka hijau dengan pengelolaan pertamanan.
- 15) Meningkatkan jumlah dan pengelolaan penerangan jalan umum dan meterasasi.

c. Misi 3: Memantapkan Kondisi Sosial Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan dan kemitraan seluruh elemen masyarakat serta peningkatan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan.
- 2) Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa.
- 3) Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan melalui perencanaan yang komprehensif.
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme.
- 5) Meningkatkan peran kader posyandu untuk meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi
- 6) Meningkatkan pemerataan sarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah, melalui perbaikan ruang kelas yang rusak, pembangunan ruang kelas baru, kerjasama dengan pihak swasta dan komite sekolah serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sekitar untuk perintisan adanya perguruan tinggi di Kajen.
- 7) Meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang biayanya terjangkau, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
- 8) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemberian beasiswa dan kesempatan untuk studi lanjut dan mengikuti pendidikan dan latihan.
- 9) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan, serta bursa kerja kerja *on line*.
- 10) Meningkatkan minat baca melalui pembangunan dan pengembangan perpustakaan masyarakat, pengadaan kegiatan yang mendorong minat baca masyarakat, peningkatan koleksi buku perpustakaan.
- 11) Mengoptimalkan pengelolaan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat.
- 12) Mengoptimalkan PSKS (Potensi, Sumberdaya Kesejahteraan Sosial) melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

- 13) Mengoptimalkan lembaga dan organisasi kesenian dalam meningkatkan potensi kesenian lokal, pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat
- 14) Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku.
- 15) Meningkatkan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana.
- 16) Meningkatkan kelestarian arsip daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana kearsipan serta peningkatan kapasitas arsiparis.
- 17) Mengoptimalkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui peningkatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten.
- 18) Meningkatkan kualitas transmigrasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigrans, peningkatan kinerja aparat penyelenggara transmigrasi dan koordinasi antar daerah asal dan tujuan transmigrasi.

d. Misi 4: Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

- 1) Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan.
- 2) Meningkatkan kapasitas industri kecil dan menengah melalui fasilitasi akses permodalan, temu usaha dan penguatan pemasaran.
- 3) Meningkatkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB melalui perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, penyusunan kebijakan distribusi barang dan jasa, pengembangan jaringan kerjasama perdagangan baik intern maupun ekstern.
- 4) Meningkatkan destinasi wisata melalui optimalisasi pengelolaan obyek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.
- 5) Meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian melalui optimalisasi distribusi saprodi pertanian dan peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
- 6) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir.
- 7) Meningkatkan Produktivitas Perkebunan dan kehutanan melalui optimalisasi perkebunan rakyat dan hutan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan dan kehutanan.

e. Misi 5: Mendorong Iklim Investasi Berbasis Potensi dan Budaya Daerah.

- 1) Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perijinan penanaman modal.
- 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal.
- 3) Meningkatkan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan.

f. Misi 6: Mewujudkan Rasa Aman dan Adil Pada Masyarakat.

- 1) Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum, pengawasan intensif oleh masyarakat dalam penegakan hukum, peningkatan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan pada kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/kelurahan dengan Kepolisian.
- 3) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak melalui penguatan kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak, serta pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

g. Misi 7: Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Politik, Sosial Maupun Budaya.

- 1) Meningkatkan kinerja aktivitas kelembagaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
- 2) Meningkatkan forum-forum publik sebagai media komunikasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan keterbukaan di kalangan masyarakat, partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk kearifan lokal.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pendidikan berpolitik di masyarakat melalui pengembangan kader-kader sosial masyarakat, dan optimalisasi partai politik.
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan potensi swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*), serta memanfaatkan peluang kerjasama antar daerah.

2. Arah Kebijakan

a. Arah Kebijakan Tahun 1 (2011-2012)

- 1) Penyusunan rancangan *e-government* di lingkungan sekretariat daerah dan penerapannya di 3 (tiga) SKPD.

- 2) Optimalisasi sarana dan prasarana peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam Penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan Kapasitas dan optimalisasi kinerja organisasi SKPD.
- 4) Peningkatan profesionalitas dan kompetensi SDM aparatur, termasuk aparatur pengawasan.
- 5) Pembangunan Depo Arsip sebagai *Record Center*.
- 6) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan kabupaten sampai ke desa.
- 7) Peningkatan kualitas jaringan irigasi.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas rawat inap).
- 9) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan surveillance DBD, TB Paru dan penyakit menular lainnya serta Penyakit Tidak Menular (PTM).
- 11) Peningkatan sarana dan prasarana jenjang pendidikan PAUD/TK/RA.
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 13) Peningkatan kualitas proses belajar mengajar guna meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- 14) Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bagi pondok pesantren.
- 15) Peningkatan infrastruktur layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rawan bencana.
- 16) Penyediaan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan usaha mikro dan kecil bagi keluarga miskin.
- 17) Penyediaan sarana dan prasarana, olahraga, kesenian dan organisasi kepemudaan
- 18) Fasilitasi modal bagi kelompok UMKM (konveksi, batik, makanan olahan, *handycraft*, ATBM).
- 19) Fasilitasi modal bagi pelaku ekonomi di bidang pertanian.
- 20) Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung investasi kebutuhan masyarakat lokal.
- 21) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas perijinan investasi dan pelayanan publik.
- 22) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 23) Penyediaan sarana dan prasarana penegakkan hukum dan pendidikan kepada masyarakat.
- 24) Penyediaan *hotspot area* sebagai ruang masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi.
- 25) Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja

b. Arah Kebijakan Tahun 2 (2012-2013)

- 1) Aplikasi *e- government* di lingkungan sekretariat daerah dan SKPD strategis.
- 2) Penyusunan kebijakan dan penerapan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
- 3) Optimalisasi penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kapasitas dan optimalisasi kinerja organisasi SKPD.
- 4) Penyusunan perda tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan.
- 5) Peningkatan kualitas ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik.
- 6) Pengembangan infrastruktur dan perangkat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 7) Optimalisasi sarana dan prasarana bagi peningkatan penyelenggaraan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal.
- 8) Optimalisasi rehabilitasi dan penambahan ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar.
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk sanitasi lingkungan permukiman dan sarana air bersih.
- 11) Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten sampai ke desa.
- 12) Peningkatan kualitas jaringan irigasi.
- 13) Peningkatan teknologi pengelolaan sampah pada TPA dari *open dumping* menuju *sanitary landfill dan controlfill*.
- 14) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
- 15) Peningkatan gizi balita dan masyarakat.
- 16) Peningkatan sarana dan prasarana PAUD.
- 17) Fasilitasi beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yang berprestasi
- 18) Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama tentang pendidikan kearifan lokal dan budi pekerti.
- 19) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah
- 20) Peningkatan kesejahteraan bagi pelaku pendidikan non formal dan informal (guru TPQ, RA/BA/TK).
- 21) Perintisan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya sebagai daerah penyangga.
- 22) Pemberdayaan lembaga keswadayaan masyarakat kelurahan/desa dalam penanggulangan kemiskinan.
- 23) Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan berdasarkan kearifan lokal.
- 24) Pengembangan dan penciptaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan kearifan lokal.

- 25) Peningkatan infrastruktur dalam mitigasi bencana dan penanggulangan bencana.
- 26) Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan perijinan UMKM, akses permodalan usaha dan pemasaran produk UMKM.
- 27) Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana produksi bagi petani, UMKM, dan peternak.
- 28) Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban serta menjamin kondusifitas dan kenyamanan iklim investasi.
- 29) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung investasi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan melibatkan dunia usaha.
- 30) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi.
- 31) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum dalam penegakkan hukum.
- 32) Menjamin pelaksanaan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.
- 33) Mengadakan panggung ekspresi pelajar, pemuda dan kaum intelektual lainnya.

c. Arah Kebijakan Tahun 3 (2013-2014)

- 1) Penerapan e-government di lingkungan sekretariat daerah dan SKPD strategis (15 SKPD).
- 2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kelurahan dan kecamatan.
- 3) Pengembangan diklat profesionalisme dan kompetensi aparaturnya termasuk aparaturnya pengawasan.
- 4) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Identifikasi kebutuhan PNS dan penetapan model rekrutmen pegawai yang profesional transparan dan bebas KKN.
- 6) Peningkatan kuantitas ruang kelas pendidikan menengah.
- 7) Peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap.
- 8) Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana PAUD.
- 9) Peningkatan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelompok usaha kesehatan bersama (UKBM).
- 10) Peningkatan cakupan pelayanan jamkesmas, jampersal dan jamkesda.
- 11) Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan.
- 12) Peningkatan kemampuan KIE bagi kader kesehatan desa/kelurahan tentang perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit menular serta penyakit tidak menular.
- 13) Peningkatan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 14) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak ringan dan berat untuk jenjang pendidikan dasar.
- 15) Peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan sekolah maupun masyarakat.

- 16) Pemberdayaan lembaga di dalam masyarakat yang menangani PMKS.
- 17) Peningkatan nilai sosial budaya dan adat istiadat dalam masyarakat.
- 18) Pengembangan kelembagaan koperasi dan perluasan usaha koperasi.
- 19) Penataan pedagang kakilima dengan pendekatan partisipatif.
- 20) Peningkatan pengelolaan obyek wisata guna meningkatkan pendapatan di bidang pariwisata.
- 21) Fasilitasi bantuan peralatan tangkap bagi nelayan kurang mampu (miskin).
- 22) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan pada kantor pelayanan terpadu dan unit pelayanan masyarakat yang lain.
- 23) Peningkatan penghormatan terhadap kebebasan berserikat bagi kelompok-kelompok masyarakat (Serikat Pekerja, Serikat Petani, Serikat Nelayan dan lain sebagainya).
- 24) Melindungi kelompok-kelompok minoritas atas dominasi kelompok lain.
- 25) Peningkatan iklim demokratis dikalangan masyarakat.
- 26) Pengembangan mekanisme dialogis dalam penyelesaian masalah.
- 27) Meningkatkan perlindungan dan lembaga ketenagakerjaan
- 28) Meningkatkan cakupan penanganan PMKS
- 29) Meningkatkan kualitas dan kuantitas transmigrasi
- 30) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

d. Arah Kebijakan Tahun 4 (2014-2015)

- 1) Peningkatan Penerapan *e-government* di lingkungan setda dan SKPD strategis (16 SKPD).
- 2) Evaluasi SOTK dan kelembagaan penyelenggara pemerintahan.
- 3) Penyempurnaan kualitas pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu dan unit pelayanan lainnya.
- 4) Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi.
- 5) Pengurangan kerusakan lahan dan hutan.
- 6) Peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu.
- 7) Peningkatan kuantitas rumah tangga berlistrik.
- 8) Peningkatan kesadaran imunisasi pada masyarakat.
- 9) Peningkatan pelayanan bagi balita gizi buruk dan kurang.
- 10) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- 11) Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah.
- 12) Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan kecakapan hidup.
- 13) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam minat baca.
- 14) Peningkatan akses bagi penduduk miskin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah.
- 15) Peningkatan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 16) Fasilitasi kelompok-kelompok olahraga sebagai pengembangan jasmani manusia.

- 17) Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah.
- 18) Pengembangan usaha peternakan dan peningkatan produk unggulan peternakan terutama ternak besar.
- 19) Peningkatan jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
- 20) Pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir
- 21) Peningkatan jumlah investasi baik investasi PMA, PMDN dan non fasilitas.
- 22) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
- 23) Melindungi kelompok-kelompok minoritas atas dominasi kelompok lain.
- 24) Optimalisasi pengelolaan sistem keamanan lingkungan oleh masyarakat dan Penguatan kelembagaan masyarakat.
- 25) Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- 26) Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat.

e. Arah Kebijakan Tahun Ke 5 (2015-2016)

- 1) Percepatan penerapan *e-government* di seluruh SKPD.
- 2) Pemantapan pengembangan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
- 3) Pemantapan kompetensi dan kapasitas aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 4) Pemantapan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
- 5) Percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi BUMD.
- 6) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi daerah.
- 7) Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 8) Percepatan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap.
- 9) Percepatan pemenuhan jumlah tenaga medis dan para medis.
- 10) Akselerasi Peningkatan kapasitas Desa Siaga dan Kelurahan Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.
- 11) Percepatan peningkatan Kualifikasi Pendidik PAUD /TK /RA.
- 12) Percepatan Peningkatan pemertaan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 13) Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 14) Pengembangan budaya membaca di kalangan masyarakat.
- 15) Percepatan perwujudan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya sebagai daerah penyangga.
- 16) Pengembangan dan pemantapan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok kesenian (baik tradisional, religius, modern).

- 17) Akselerasi Perwujudan desa atau kelurahan siaga bencana.
- 18) Pemantapan pemberian ketrampilan kewirausahaan bagi pemuda untuk memperluas kesempatan kerja.
- 19) Pemantapan peningkatan produksi, mutu dan pemasaran produk/komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.
- 20) Akselerasi peningkatan produktivitas perikanan budidaya.
- 21) Akselerasi Peningkatan jumlah investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas.
- 22) Percepatan peningkatan perlindungan hak-hak anak.
- 23) Percepatan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.
- 24) Akselerasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

C. Prioritas Daerah

Rencana Program Prioritas Pembangunan selama 5 tahun Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Misi : 1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 1 adalah sebagai berikut:

- a. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan prioritas penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (evaluasi SOTK);
- b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan prioritas pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi;
- c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan prioritas pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
- d. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan prioritas pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan prioritas intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. Program penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan prioritas pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
- g. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan prioritas penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik;
- h. Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah dengan kegiatan prioritas penguatan komunikasi publik melalui website dan sms center;
- i. Program kerjasama informasi dan media massa dengan kegiatan prioritas Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kegiatan prioritas fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik;
- k. Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dengan kegiatan prioritas penyertaan modal bagi BUMD

2. Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang Berwawasan Lingkungan

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 2 adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah dengan Kegiatan prioritas pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan persampahan;
- b. Program pengendalian pemanfaatan ruang dengan kegiatan prioritas fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. Program pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan prioritas pembinaan penggunaan dana ADD (Alokasi Dana Desa);
- e. Program penataan peraturan perundangan dengan kegiatan prioritas penyusunan peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan sebagian urusan kabupaten ke desa;
- f. Program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan prioritas Kegiatan prioritas penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum;
- g. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan prioritas rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan dengan kegiatan prioritas penyediaan sarana tenaga kelistrikan diluar jangkauan PLN;
- i. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan prioritas Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. Program penataan pedagang kaki lima dengan kegiatan prioritas penataan pedagang kaki lima;
- l. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dengan kegiatan prioritas pembangunan depo arsip;
- m. Program pengembangan pondok pesantren dengan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren;
- n. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan kegiatan prioritas peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- o. Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan kegiatan prioritas pembangunan puskesmas rawat inap dan peningkatan serta perbaikan puskesmas dan jaringannya;
- p. Program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan kegiatan prioritas bantuan aspal desa/kelurahan;

- q. Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan prioritas Penanganan lingkungan kawasan kumuh;
- r. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan prioritas Pembangunan infrastruktur terpadu pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- s. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan prioritas Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- t. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan prioritas Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C;
- u. Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Pencemaran dengan kegiatan prioritas Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.

3. Misi 3 : Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 3 adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan pondok pesantren dengan kegiatan prioritas fasilitasi pendidikan Pondok Pesantren;
- b. Program PAUD dengan kegiatan prioritas Peningkatan sarana dan prasarana PAUD;
- c. Program Pendidikan Dasar dengan kegiatan prioritas rehabilitasi ruang kelas;
- d. Program pendidikan menengah dengan kegiatan prioritas pembangunan sarana prasarana penunjang pembelajaran (laboratorium, workshop/bengkel kerja, perpustakaan);
- e. Program perintisan pendidikan tinggi dengan kegiatan prioritas perintisan kerja sama pengembangan pendidikan tinggi di Kajen;
- f. Program pendidikan non formal dengan kegiatan prioritas Peningkatan kesejahteraan bagi pelaku pendidikan non formal dan informal (guru TPQ, RA/BA/TK);
- g. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan kegiatan prioritas Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
- i. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- j. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan prioritas fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten
- k. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan prioritas pemyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar;
- l. Program pendidikan menengah dengan kegiatan prioritas pemberian beasiswa SMA/MTs/SMK bagi siswa kurang mampu yang berprestasi;

- m. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan prioritas Pendampingan pelayanan kesehatan maskin di RSUD, RS Swasta, Pusk, perawatan
- n. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan prioritas pemberdayaan masyarakat (Desa siaga, Upaya kesehatan Kerja, Poskestren, SBH)
- o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- p. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan prioritas kegiatan pemberantasan penyakit menular.
- q. Program penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan prioritas penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
- r. Program pelayanan dan rehabilitasi social dengan kegiatan prioritas Bimbingan rehabilitasi social dan rehabilitasi medic bagi Penyandang Cacat Bibir Sumbing (PCBS)
- s. Program pengembangan informasi kesejahteraan sosial (SIKS, SIBI, SIG) dengan prioritas program pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- t. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan prioritas pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
- u. Program pembinaan anak terlantar kegiatan pelayanan petirahan anak sekolah bermasalah sosial
- v. Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan prioritas pemantauan dan penyebarluasan informasi daerah berpotensi terjadi bencana alam;
- w. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan prioritas fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;
- x. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan prioritas fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;
- y. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas pemberian tambahan makanan dan vitamin
- z. Program keluarga berencana dengan kegiatan prioritas pembinaan keluarga berencana (peningkatan PB KB);
- aa. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan prioritas peningkatan kearifan local;
- bb. Program Pengembangan kesenian daerah dengan kegiatan prioritas fasilitasi kelompok-kelompok kesenian (baik tradisional, religious, modern);
- cc. Program pengembangan olahraga berprestasi dengan kegiatan prioritas fasilitasi pengembangan cabang-cabang olah raga prestasi.

4. Misi 4 : Fasilitasi Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 4 adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan prioritas Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan prioritas Peningkatan kualitas dan teknis pemasaran atas hasil produksi pertanian;
- c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan prioritas Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan;
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatan prioritas fasilitasi peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- e. Program pengembangan publik pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan prioritas pengembangan jaringan pemasaran produk UMKM;
- f. Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan prioritas Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
- g. Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan prioritas Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
- h. Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan prioritas Pengembangan objek pariwisata unggulan;
- i. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan prioritas fasilitasi pengembangan UMKM (pelatihan, pendampingan dan pemberian modal);
- j. Program pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan prioritas Pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana pembenihan ikan;
- k. Program pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan prioritas Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya.
- l. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan prioritas Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi (Jeans center)
- m. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dengan kegiatan prioritas Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UMKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar UMKM maupun antara UMKM dengan Usaha Besar. 150 JT
- n. Pemberdayaan usaha skala mikro dengan kegiatan prioritas pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas

- koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif.
- o. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan prioritas fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di pedesaan berdasarkan identifikasi best practices dan lessons learned program-program pemberdayaan masyarakat SERTA pengawasan.
 - p. Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan prioritas Pembibitan dan Perawatan Ternak.
 - q. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif dengan kegiatan prioritas perencanaan pembangunan ekonomi.

5. Misi 5: Mendorong iklim investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 5 adalah sebagai berikut:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan prioritas Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- b. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan prioritas Pengembangan potensi unggulan daerah;
- c. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi kegiatan prioritas pelaksanaan event promosi investasi;
- d. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan prioritas Penyederhanaan prosedur perijinan penanaman modal;
- e. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan prioritas penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) investasi; pemberian insentif kepada investor berupa tax holiday dan pengurangan pajak;
- f. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan prioritas peningkatan keamanan ketertiban lingkungan.

6. Misi 6: Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 6 adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan prioritas Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama;
- b. Program pengembangan organisasi masyarakat dengan kegiatan prioritas Peningkatan pembinaan ormas dan orsospol;
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan prioritas Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan prioritas peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan prioritas penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan prioritas sosialisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Misi 7: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

Program dan Kegiatan prioritas untuk misi 7 adalah sebagai berikut:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan prioritas Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana komunikasi/informasi dengan kegiatan prioritas membuat hot spot area di ruang publik terpilih;
- c. Program peningkatan peran masyarakat dalam bidang kominfo dengan kegiatan prioritas fasilitasi forum diskusi masyarakat sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan prioritas pembentukan dan penguatan forum musyawarah tingkat kecamatan;
- e. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan prioritas fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
- f. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan prioritas penyuluhan politik kepada masyarakat.
- g. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan kegiatan prioritas Pengembangan taman rekreasi.